



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024



DINAS PERTANIAN KOTA PAYAKUMBUH

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan salah satu tugas Organisasi Perangkat Daerah yaitu penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2024. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2024 disusun dalam upaya memberikan gambaran terhadap capaian dari sasaran strategis OPD yang telah dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reriew Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan dalam pelaksanaan program dan kegiatan kedepan dalam hal mewujudkan target sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan baik sehingga pencapaian visi dan misi skala OPD dan daerah dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Pada akhirnya kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini dapat dijadikan gambaran pencapaian strategis saat ini dan sebagai dasar dan acuan pencapaian sasaran strategis ditahun berikutnya.

Payakumbuh, Januari 2025

Kepala Dinas Pertanian

Kota Payakumbuh



Ir. DEPI SASTRA

Nip 19650212 199303 1 011

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pertanian selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat terutama pada urusan pertanian dan perikanan.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Payakumbuh, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut

Dinas Pertanian Kota Payakumbuh diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Dinas Pertanian Kota Payakumbuh

Dinas Pertanian Kota Payakumbuh dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dengan tipologi B yang mengurus bidang urusan pertanian dan urusan perikanan.

Dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tersebut, Dinas Pertanian Kota Payakumbuh merupakan gabungan dari Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan dengan Dinas Perikanan dan Peternakan, yang mengurus urusan pertanian dan perikanan, yang terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang.

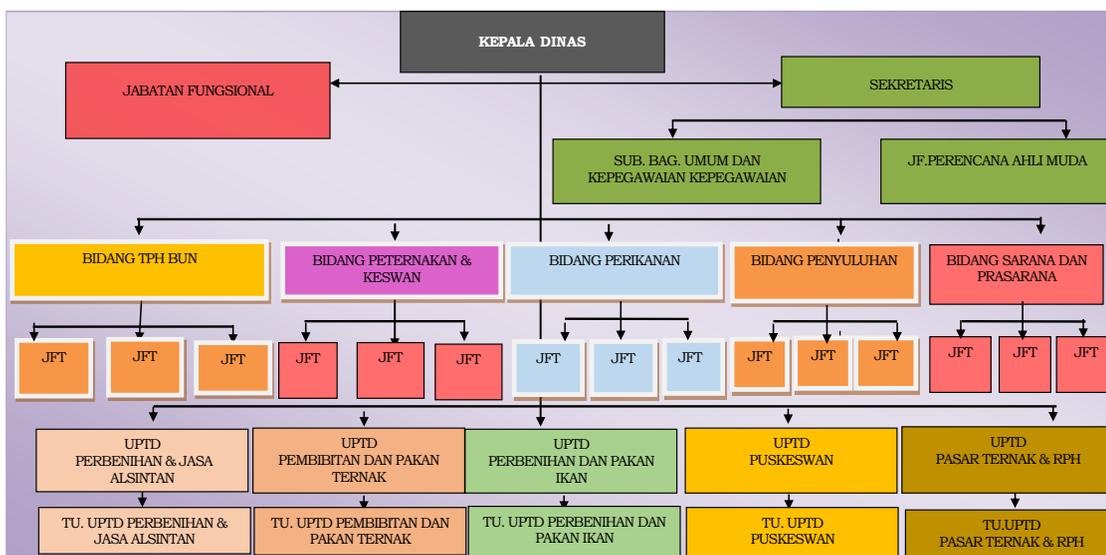
C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Pertanian Kota Payakumbuh mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam urusan bidang pertanian dan perikanan. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pertanian Kota Payakumbuh mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang perikanan.
- b. Pembinaan teknis dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang perikanan, dan pelayanan umum.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian dan bidang perikanan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Pertanian Kota Payakumbuh dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kota Payakumbuh berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 seperti pada Gambar 2.1 berikut ini:



Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pertanian Kota Payakumbuh diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintah Daerah bidang Pertanian dan bidang Perikanan serta perumusan kebijakan, rencana strategis, pembinaan dan pengkoordinasian serta penyelenggaraan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi yang meliputi pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumah tanggaan serta mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diatas, Sekretariat dibantu oleh Subbag Umum dan Kepegawaian, Subbag Perencanaan dan Keuangan.

3. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dan menyiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, mengkoordinasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan perbenihan dan sarana produksi tanaman pangan dan hortikultura, budidaya dan perlindungan tanaman serta pemasaran hasil tanaman pangan hortikultura.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diatas, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura di bantu oleh Seksi Produksi Tanaman Pangan, Seksi

Produksi Hortikultura dan Seksi Sarana Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura.

4. Bidang Sarana Dan Prasarana

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dan menyiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pedoman petunjuk teknis pengembangan dan pengendalian di Bidang Sarana dan Prasarana.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Sarana dan Prasarana dibantu oleh Seksi Lahan dan Irigasi, Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat dan Mesin dan Seksi Investasi dan Pembiayaan.

5. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dibantu oleh Seksi Produksi, Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

6. Bidang Perikanan.

Bidang Perikanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Perikanan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Perikanan dibantu oleh Seksi Produksi, Seksi Perbenihan dan Pakan dan Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

7. Bidang Penyuluhan

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dan menyiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan teknis dan administrasi bidang penyuluhan;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi Penyusun kebijakan teknis di bidang penyuluhan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bidang Penyuluhan dibantu oleh Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, Seksi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Seksi Metodologi dan Informasi.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

UPDT Pembenihan dan Pelayanan Jasa Alsintan, UPTD Puskesmas, UPTD Perbenihan dan Pakan Ikan, UPTD RPH dan Pasar Ternak dan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya UPTD dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan UPTD meliputi penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan dan perencanaan, tata laksana, evaluasi dan pelaporan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional (KJF)

Kelompok Jabatan Fungsional, merupakan kesatuan kelompok fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Peternakan.

D. Isu Strategis

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional. Selanjutnya secara rinci identifikasi isu-isu strategis menurut fungsi dan urusan pemerintahan daerah sebagai perumusan kebijakan umum dan program pembangunan untuk lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian

Perencanaan kegiatan pembangunan merupakan suatu sistem yang berkelanjutan, keberhasilan dan kegagalan capaian periode sebelumnya menentukan penyusunan rencana pembangunan untuk tahun-tahun selanjutnya. Untuk menghasilkan perencanaan yang lebih baik maka berbagai kendala dan permasalahan yang telah dialami pada pelaksanaan perencanaan kegiatan periode sebelumnya perlu diidentifikasi sebaik mungkin.

Identifikasi permasalahan dilakukan dengan mengevaluasi dan memperhatikan capaian kinerja Dinas Pertanian Kota Payakumbuh dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya produktifitas hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

Belum optimalnya produktifitas hasil tanaman disebabkan karena menurunnya intensitas pertanaman (IP), meningkatnya jumlah kehilangan hasil panen (lossis), menurunnya mutu benih/bibit bahan tanaman yang terawasi dan meningkatnya serangan hama penyakit.

2. Belum optimalnya ketersediaan prasarana dan sarana produksi pertanian
Kurangnya ketersediaan pupuk dan alsintan yang digunakan petani, kurangnya kualitas irigasi pertanian dan masih sedikitnya aksestabilitas pembiayaan kepada petani.
3. Masih kurangnya tingkat SDM dan kelembagaan petani
SDM yang kurang ditandai dengan kurangnya penerapan teknologi budidaya pertanian yang diterapkan masih kesedikit. Masih kurangnya kelembagaan petani juga jadi salah satu factor penyebab dan masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan penyuluh pertanian ikut menjadi penyebab kurangnya SDM petani.
4. Belum optimalnya inseminasi buatan (IB)
Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pelayanan gangguan reproduksi (Gangrep) serta kurangnya akseptor IB
5. Menurunnya status kesehatan hewan dan kesmavet.
Hal ini disebabkan Menurunnya identifikasi penyakit hewan, menurunnya penanggulangan penyakit hewan, menurunnya pelayanan kesehatan hewan dan Kurangnya pengawasan PAH dan BPAH.
6. Menurunnya ketersediaan bibit dan pakan ternak
Hal ini dikarenakan kurangnya standar mutu pakan ternak dan kurangnya pemanfaatan teknologi pengolahan pakan ternak juga menjadi andil dalam menurunnya ketersediaan pakan ternak serta kurangnya ketersediaan bibit ternak.
7. Belum optimalnya penggunaan benih ikan unggul
Ketersediaan induk ikan unggul yang tidak memadai dan berakibat kurangnya produksi benih ikan unggul menjadi penyebab belum optimalnya penggunaan benih ikan unggul.
8. Belum optimalnya penggunaan bahan pakan bermutu
Penggunaan bahan pakan yang bermutu masih kurang karena masih kurangnya pembudidaya yang menggunakan pakan bermutu, kurangnya pembudidaya yang menggunakan pakan alternative.
9. Belum optimalnya kesehatan ikan dan lingkungan
Hal ini disebabkan karena menurunnya kualitas air kawasan budidaya perikanan dan ketersediaan obat ikan yang kurang.

10. Belum optimalnya penerapan teknologi anjuran budidaya perikanan
Belum optimalnya penerapan teknologi anjuran budidaya perikanan karena kurangnya kawasan penerapan teknologi anjuran dan kurangnya pembudidaya yang menerapkan teknologi anjuran.
11. Kurangnya pemasaran hasil produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
Masih rendahnya pengolahan hasil pertanian dan kurang lancarnya operasional TA dan STA menjadi factor kurangnya pemasaran hasil produksi Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
12. Kurangnya pemasaran hasil produksi peternakan
Hal ini disebabkan karena kurangnya pengolahan hasil peternakan dan kurangnya jumlah ternak yang diperdagangkan di pasar ternak.
13. Kurangnya pemasaran hasil produksi perikanan
Hal ini disebabkan karena kurangnya olahan ikan sesuai standar kesehatan dan kurangnya kelompok pengolah hasil perikanan.
14. Adanya Pandemi Covid-19 mempengaruhi segala sektor kehidupan termasuk sektor ekonomi di bidang Pertanian.

Peningkatan perekonomian Kota Payakumbuh tidak terlepas dari pembangunan dan pengembangan sektor pertanian dan perikanan. Hal ini disebabkan karena sektor ini mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan lahan maupun dari hasil produksi pertanian dan Perikanan itu sendiri. Disamping untuk konsumsi, produksi sektor pertanian dan Perikanan juga sangat berperan dalam pengembangan industri di Kota Payakumbuh terutama industri kecil dan menengah berbahan dasar hasil pertanian dan Perikanan seperti industri makanan spesifik dan makanan ringan.

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Walikota Payakumbuh maka saat ini yang menjadi Pedoman adalah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh 2023 - 2026 sudah menetapkan arah, tujuan dan sasaran pembangunan sektor pertanian yang menjadi pedoman bagi Dinas Pertanian dalam menyusun rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024.

Pada Misi II RPJMD yang berbunyi Membangun perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing, dan berkeadilan dengan berbasis ekonomi kerakyatan dengan memunculkan gerakan ekonomi bersama, telah dirumuskan salah satu tujuannya untuk berkembangnya aktifitas

perekonomian di kota Payakumbuh sebagai pusat distribusi barang dan jasa baik skala lokal maupun regional dan persiapan sebagai pusat pasokan komoditi barang dan jasa untuk kebutuhan pasar Asean dengan sasaran yang terkait dengan sektor pertanian adalah meningkatnya produksi, produktifitas, nilai tambah dan pemasaran komoditas pertanian, perikanan dan kehutanan.

Disamping itu, sesuai dengan program nasional peningkatan produksi untuk mencapai swasembada pangan ditindak lanjuti dengan penandatanganan MoU antara Menteri Pertanian dengan KASAD TNI, Pemerintah Kota Payakumbuh juga telah melaksanakan Program Upaya Khusus Padi, Jagung dan Kedele (Upsus Pajale) bekerja sama dengan Kodim 0306/Lima Puluh Kota.

Untuk mendukung peningkatan produksi dan Upsus tersebut, arah kebijakan yang dilakukan pada tahun 2024 adalah menerapkan inovasi teknologi usaha tani, meningkatkan sumber daya manusia petani dan Penyuluh Pertanian, meningkatkan intensitas Pertanian, penyediaan bantuan sarana dan prasarana produksi, dan perbaikan infrastruktur usaha tani.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sektor pertanian khususnya tanaman pangan Hortikultura dan perkebunan serta Perikanan di Kota Payakumbuh pada tahun 2024, masih ditemui beberapa kendala dan permasalahan yang berpengaruh pada upaya peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan, antara lain :

1. Terjadinya perubahan iklim yang cukup signifikan (Iklim Ekstrim).
2. Masih terbatasnya infrastruktur usaha tani (jaringan irigasi), jalan usaha tani.
3. Belum memadainya jumlah alat mesin pertanian dalam rangka menuju pertanian modern.
4. Belum mencukupinya benih/bibit unggul bermutu, terutama saat dibutuhkan,
5. Belum optimalnya penanganan panen dan pasca panen, sehingga angka losis masih tinggi.
6. Masih tingginya tingkat konsumsi beras masyarakat Kota Payakumbuh (110 Kg/ kelompok tani/tahun).
7. Masih rendahnya pemahaman petani terhadap perkembangan teknologi pertanian terutama yang dihasilkan balai penelitian dan Perguruan Tinggi.
8. Ternak yang terserang penyakit yang mempengaruhi pertumbuhannya, yang menyebabkan memperlambat perkembangan Reproduksi.

9. Gangguan reproduksi (gangrep) yaitu terganggunya reproduksi pada ternak sapi yang mengakibatkan memperlambat populasi sapi.
10. Ketersediaan pakan ternak (terutama hijauan pakan ternak).
11. Kontinuitas pakan yang tergantung pada musim, kondisi tanah, keterbatasan pupuk.
12. Musim kemarau yang menyebabkan berkurangnya sumber air kolam.
13. Belum terkuasainya teknologi pembesaran dan pembenihan.
14. Masih rendahnya penggunaan benih ikan unggul dan pakan bermutu.

Disamping kondisidi atas, pembangunan pertanian dan Perikanan kedepan juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu di antisipasi antara lain :

1. Pertambahan penduduk yang cukup tinggi dan belum sebanding dengan peningkatan produksi pangan.
2. Cukup tingginya alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian
3. Diberlakukannya pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean
4. Adanya Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi segala lini kehidupan masyarakat, termasuk sektor ekonomi bidang Pertanian.

Kondisi internal Dinas Pertanian pada Tahun 2024 juga sangat mempengaruhi proses pelaksanaan tugas yang disebabkan oleh :

- Kurangnya personil pendukung pelaksanaan tugas, dimana hampir semua Kepala Seksi tidak memiliki staf.
- Kurang terjaminnya berlangsungnya kondisi irigasi.
- Perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur urusan Pertanian dan Perikanan, maksudnya perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur yang menunjang keberhasilan urusan pertanian peternakan dan perikanan.

E. Landasan Hukum

LKjIP Kota Payakumbuh ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023- 2026;

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi penjelasan umum organisasi, tugas dan fungsi, isu strategis yang dihadapi SKPD, dasar hukum dan sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi ringkasan/iktisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun 2024 dengan berpedoman pada dokumen perencanaan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Anggaran dan capaian prestasi dan penghargaan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kota Payakumbuh adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pertanian Kota Payakumbuh. Rencana Strategis Dinas Pertanian Kota Payakumbuh yang ditetapkan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 04 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Penetapan jangka waktu 4 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pertanian Kota Payakumbuh dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pertanian Kota Payakumbuh tersebut ditujukan untuk mewujudkan Arah Kebijakan Strategis Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kota Payakumbuh telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pertanian Kota Payakumbuh merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pertanian Kota Payakumbuh dan *stakeholder terkait*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pertanian Kota Payakumbuh tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kota Payakumbuh yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Pertanian Kota Payakumbuh dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi merupakan gambaran masa yang akan datang yang ingin diwujudkan oleh pemerintah. Berdasarkan potensi, kondisi dan permasalahan yang ada maka visi dari Kepala Daerah Terpilih sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026 adalah untuk mewujudkan. Adapun misi pembangunan jangka menengah Kota Payakumbuh adalah:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Handal, sehat dan Kompetitif
2. Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Bedaya Saing dan Berkeadilan Dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama
3. Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum Yang Nyaman dan Berkelanjutan
4. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih
5. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya berdasarkan Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah

Berdasarkan 5 (lima) misi di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Pertanian mendukung dan melaksanakan misi 2, yaitu: Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Bedaya Saing dan Berkeadilan Dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama. Selanjutnya telaahan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Visi Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2022-2026 adalah **“Terwujudnya Kemandirian, Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”**

2. Misi

Untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dan memotifasi kinerja Aparatur Pertanian serta Stake Holder terkait, maka Dinas Pertanian dalam hal ***mewujudkan Visi Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2022-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut : “Mewujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan”***

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Tujuan Kota Payakumbuh yaitu Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas Tahun 2023-2026, dimana diturunkan menjadi 2 (dua) sasaran strategis, yaitu :

1. Meningkatnya Produksi Pertanian
2. Meningkatnya Produksi Perikanan

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Pertanian Kota Payakumbuh

No	Tujuan	Sasaran Kota Payakumbuh	Arah Kota Payakumbuh Sekaligus Tujuan Dinas Pertanian	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU/SPM)	Sat.	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-		Ket	
							2023	2024		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Meningkatnya Sektor Strategis	Meningkatnya Nilai Tambah Dan Daya Saing Pertanian	1	Meningkatnya Produksi Pertanian	Produksi Padi	Ton	41.200	41.225	IKU
						Populasi Sapi	Ekor	5400	5427	IKU
				2	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan	Ton	560	560	IKU

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor: 81 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh dan Tahun 2023-2026.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU/SPM)	Sat.	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-		Ket
				2023	2024	
1	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Produksi Pertanian	Produksi Padi	Ton	41.200	41.225	IKU
		Populasi Sapi	Ekor	5400	5427	IKU
2	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan	Ton	560	560	IKU

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Indikator (Formula)	
1	Meningkatnya Produksi Pertanian	Produksi Padi	- Jumlah Produksi Padi Per tahun berjalan	-
		Populasi Sapi	Jumlah Populasi Sapi Per tahun berjalan	-
2	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Ikan Per tahun berjalan	-

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2024 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Dinas Pertanian Kota Payakumbuh telah menetapkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3.

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Produksi Pertanian	Produksi Padi	41.225 ton
		Populasi Sapi	5427 ekor

2	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan	560 ton
---	---------------------------------	---------------------------------	---------

2.1. Program dan Kegiatan Untuk Mencapai Sasaran Strategis

Urusan dan Program Dinas Pertanian Tahun 2024 sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 untuk mencapai sasara strategis sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3. Program Pngelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner
7. Program Penanggulangan Bencana Pertanian
8. Program Perizinan Usaha Pertanian
9. Program Penyuluhan Pertanian

Dari sembilan program yang ada tersebut, satu program pertama merupakan penunjang pencapaian sasaran Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian, sedangkan ke delapan sasaran lainnya merupakan program pendukung pencapaian peningkatan produksi pertanian dan perikanan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pertanian Kota Payakumbuh selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Kota Payakumbuh yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Pertanian.

Sesuai dengan tujuan pada Renstra Dinas Pertanian 2023-2026 bahwa tujuan Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing dengan indikator tujuan Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis ekonomi daerah harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sektor-sektor usaha. Indikator-indikator lain yang tak kalah penting antara lain inflasi, kemiskinan, investasi, nilai tukar, dan lain-lain.

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Salah satu pendekatan dalam menghitung PDRB adalah menggunakan pendekatan produksi

yang merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut

**Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pertanian Kota Payakumbuh
Tahun 2024**

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	>90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pertanian Kota Payakumbuh dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2024 hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Nomor :521/109/Diperta-Pyk/IV/2018, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

Tabel 3.1.
Target Indikator Kinerja Utama
Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Produksi Padi	Ton	41.225
2	Populasi Sapi	Ekor	5427
3	Jumlah Total Produksi Perikanan	Ton	560

B. Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum Dinas Pertanian Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2023-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 sebanyak 2 (dua) sasaran.

Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2024 terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Pertanian Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun Lima Tahun Terakhir (2020-2024)

No	Sasaran	IKU	Satuan	Realisasi Capaian					Ket	
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	1	2	3	4					5	
1	Meningkatnya Produksi Pertanian	1	Produksi Padi	Ton	43.038	43.950	42.927	46.027	41.609,46	IKU
		2	Populasi Sapi	Ekor	5965	5995	4182	2.919	2951	IKU
2	Meningkatnya Produksi Perikanan	3	Jumlah Total Produksi Perikanan	Ton	540.27	551.87	566.51	571,09	565,40	IKU

Dari 3 (tiga) indikator utama diatas, dapat dilihat tren lima tahun terakhir dimana pencapaian produksi padi mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun, dapat dilihat bahwa mengalami peningkatan dari tahun 2020-2021 dan turun lagi di tahun 2022, sementara di tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan dimana produksi 2023 adalah produksi tertinggi selama empat tahun terakhir, namun mengalami penurunan lagi di tahun 2024. Begitu juga halnya dengan jumlah total produksi perikanan, dimana mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2020-2024, namun mengalami penurunan di tahun 2024. Sedangkan untuk pencapaian populasi sapi mengalami peningkatan dari tahun 2020-2021 dan menurun drastis dari tahun 2022-2023.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 sasaran dan 3 kinerja dari 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1
Meningkatnya produksi pertanian

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.5.
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Produksi Pertanian

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Satuan	Tahun 2024		Kategori	Target Renstra Tahun 2025
				Target	Realisasi		
1	Produksi Padi	46.027	Ton	41.225	41609,46	100,96 %	41250 ton
2	Populasi Sapi	4182	Ekor	5427	2951	54,37 %	5454 ton
	Capaian Rata-rata					77,67 %	

Data Data Tersebut Dapat Dilihat Bahwa Peningkatan Produksi Padi, di Kota Payakumbuh dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif. Jika dibandingkan dari tahun 2023-2024 produksi padi mengalami penurunan, sedangkan untuk Populasi Sapi Tahun 2024 mengalami penurunan yang sangat signifikan akibat adanya PMK sehingga pencapaian IKU Dinas Pertanian Juga Mengalami Penurunan yang sangat besar hampir mencapai 16,19 %. Untuk Keberhasilan dan Penyebab penurunan masing-masing indikator dapat dilihat sebagai berikut :

a. Produksi Padi

Dilihat Produksi Padi Tahun 2024 tersebut dibanding tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 4.418 ton atau sebesar 10,6 %. Data Tersebut merupakan Data Produksi Padi kondisi Gabah Kering Panen (GKP) Kota Payakumbuh. Angka

Peningkatan Produksi Padi Kota Payakumbuh tersebut merupakan angka sementara karena Data Subron III belum disahkan oleh BPS.

Namun jika dibandingkan dengan sasaran target Renstra Dinas Pertanian Tahun 2024, pencapaian ini sudah melebihi target dengan capaian sebesar 100,96%. Jika diberikan penilaian kinerja maka sudah berada pada predikat melebihi target > 100 % dengan kode warna biru, berkategori sangat baik dimana pencapaian sudah > 90 %. Keberhasilan dalam pencapaian target ini dipicu oleh beberapa faktor-faktor yang dilakukan dalam rangka peningkatan Indikator Kinerja Produksi Padi, diantaranya:

1. Adanya Penerapan Program Upaya Khusus (UPSUS).
2. Adanya pupuk berimbang
3. Pemakaian benih unggul yang berlabel.
4. Pemakaian teknologi anjuran seperti penerapan jajar legowo dan padi tanam sebatang (PTS).
5. Sistem pengairan yang baik
6. Sistem pengendalian hama terpadu (PHT).
7. Penggunaan alat mesin pertanian
8. Penanganan panen dan pasca panen (penurunan lossis).
9. Kelembagaan petani yang memadai.

Faktor Penghambat

1. Faktor Iklim dan cuaca ekstrim
2. Faktor hama penyakit seperti tikus.
3. Sebagian masih belum melakukan budidaya secara intensif

Untuk Produksi Padi tidak bisa kita bandingkan dengan daerah Kabupaten/ Kota lain karena tergantung pada potensi wilayah masing-masing. namun capain produktifitas Padi, dapat kita Bandingkan karena disini bisa diukur Tingkat Keberhasilan Dinas Pertanian dalam peningkatan produksi. Adapun Data Capain Produktifitas Daerah dan Kabupaten Lain Se Sumatera Barat Dapat di lihat sebagaiberikut :

Tabel 3.6
 Data Prduktifitas Padi Berdasarkan (Kerangka Sampel Area) KSA
 Daerah Kab/ Kota
 Se Sumatera Barat Tahun 2023-2024

NO.	KABUPATEN / KOTA	PRODUKTIVITAS KSA		
		2023	2024	Selisih
1	KEP. MENTAWAI	2,4	2.45	0,05
2	PESISIR SELATAN	5,2	4.84	-0,36
3	SOLOK	5,3	4.75	-0,55
4	SIJUNJUNG	3,7	3.69	-0,01
5	TANAH DATAR	5,6	5.01	- 0,59
6	PADANG PARIAMAN	4,9	4.41	-0,49
7	AGAM	4,9	4.82	-0,08
8	LIMA PULUH KOTA	4,7	4.20	- 0,5
9	PASAMAN	4,6	4.34	-0,26
10	SOLOK SELATAN	4,1	3.70	- 0,4
11	DHARMASRAYA	4,4	4.35	- 0,05
12	PASAMAN BARAT	5,1	4.70	- 0,4
13	PADANG	5,0	4.65	-0,35
14	SOLOK	6,2	5.78	- 0,42
15	SAWAH LUNTO	5,9	5.20	- 0,7
16	PADANG PANJANG	6,4	5.70	- 0,7
17	BUKITTINGGI	6,4	6.32	- 0,08
18	PAYAKUMBUH	5,1	4.74	-0,36
19	PARIAMAN	5,0	4.99	-0,01
SUMATERA BARAT		5,1	4,67	-0,43

Sumber : Data KSA Sementara Dinas PTPH Prop. Sumbar.

Dari Tabel diatas dapat kita lihat, bahwa produktifitas Padi Kota Payakumbuh Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar -0,36 Ton/ Ha, jika dibandingkan dengan produktifitas Tahun 2023. Data tersebut baru Proyeksi pada Subron III, karena data ini secara resmi dirilis oleh BPS. Selain itu dapat dilihat Bahwa Produktifitas Padi di Kota Payakumbuh berada pada Posisi urutan Ke sebelas jika dibandingkan dengan daerah Kabupaten / Kota lain yang ada di Kota Payakumbuh. Dimana urutan pertama di peroleh oleh Kota Bukittinggi. Secara keseluruhan proyeksi Produktifitas Propinsi Sumatera Barat turun dari tahun sebelumnya rata-rata sebesar - 0,43 ton / tahun.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Indikator Kinerja, adalah :

1. Melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada petani.
2. Melakukan peningkatan SDM petani melalui SL (Sekolah Lapang).
3. Peningkatan infrastruktur.
4. Melakukan percepatan tanam dan penanaman tanam serentak.
5. Pemberian Bantuan Benih bersertifikat kepada Kelompok Tani serta bantuan sarana lainnya seperti pupuk kompos dan MPK.

Adapun Data penunjang capaian akhir kinerja indikator produksi padi yang diperoleh dari Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Bidang Sarana dan Prasarana dan Bidang Penyuluhan, sebagaimana table berikut :

Tabel 3.7.
Data Pendukung Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Dinas Pertanian Tahun 2024

No	Komponen	Satuan	Jumlah
1	Bantuan Benih Unggul	Ha	200
2	Pupuk Bersubsidi		
	Urea	Ton	1253,10
	NPK	Ton	1325,09
3	Perbaikan Irigasi	Paket	6 lokasi
4	Alsintan	Unit	21 unit
5	Kelembagaan tani	Kelompok	243
6	Teknologi anjuran	Paket	24
7	Pembangunan JUT	Paket	1 Paket

b. Populasi Sapi

Pencapaian Populasi Sapi Tahun 2024 sebanyak 2951 ekor Ekor sapi dari target 5427 Ekor (54,37%) dengan predikat tidak tercapai dimana realisasi kinerja < 100 % sehingga dapat dikategorikan pencapaian kinerja kurang dimana pencapaian berkisar 50-64,99 %. Hal ini tidak dapat terealisasi disebabkan oleh faktor adanya Wabah Penyakit Mulut dan Kuku, sehingga terjadinya penurunan populasi sapi. Walaupun kasus yang terjadi di Kota Payakumbuh tidak begitu banyak namun cukup mempengaruhi pada tingkat kecemasan masyarakat, sehingga peternak banyak yang menjual sapi mereka.

Adapun Data Kasus Sapi yang terjangkit PMK di Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8. Rekapitulasi Kasus PMK 2024

No	Kecamatan	Jumlah Kasus (ekor)	Ket
1	Payakumbuh Timur	0	
2	Payakumbuh Utara	4	
3	Payakumbuh Barat	8	
4	Payakumbuh Selatan	0	
5	Lamposi Tigi Nagori	36	
Jumlah		48	

Strategi dalam penanggulangan Penyakit PMK di Kota Payakumbuh pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Membentuk Unit Respot Cepat (URC) Dinas Pertanian
2. Membentuk Satgas PMK Kota Payakumbuh
3. Rapat koordinasi walikota dan stakeholder terkait
4. Sosialisasi kepada masyarakat khususnya peternak, kelompok tani, toke ternak
5. Melaksanakan penyemprotan kandang tempat terjadi kasus PMK dan kandang sekitar.
6. Melaksanakan vaksinasi.
7. Penutupan pasar ternak.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Indikator Kinerja meningkatnya populasi sapi, adalah :

1. Terlaksananya Program SIKOMANDAN.

2. Terlaksananya Program AUTS.
3. Terlaksananya Inseminasi Buatan (IB).
4. Terlaksananya sosialisasi Pelarangan hewan betina produktif.

Penunjang capaian kinerja indikator Populasi Ternak yang diperoleh dari Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.9.
Data Pendukung Populasi Ternak

No	Komponen	Satuan	Keterangan
1	Bibit Unggul	2.000 Dosis	
2	Pendataan mengenai peternakan	1 Dokumen	Data populasi ternak yang akurat
3	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	1 Pengawasan	Pelaksanaan pengawasan dan Penerbitan SKKH
4	Perawatan ternak	28 jenis	Penyediaan obat-obatan
5	Pembinaan dan pengembangan ternak	1 Dokumen	Kunjungan ke kelompok peternak
6.	Pengawasan pelarangan hewan betina produktif	1 Kegiatan	Jumlah kandang yang tersedia untuk menampung ternak harus seduai dan Gudang Pakan Ternak yang dibangun
7	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	1 kegiatan	Melakukan Pelatihan Pengolahan Hasil
8	Teknologi anjuran	2 Teknologi	Pakan Alternatif

Sumber :Dinas Pertanian Kota Payakumbuh

Dari hasil pencapaian produksi masing-masing Komoditi Pertanian yang di interpersi oleh Dinas Pertanian tersebut, maka dapat ditentukan persentase capaian Target Produksi Pertanian pada angka 77,67 %. Hal ini terjadi penurunan di dari target sebesar 100 %, Adapun tersebut tentu saja didukung oleh pelaksanaan program kegiatan dan juga anggaran yang ada pada Dinas Pertanian Tahun 2024. Adapun Program yang mendukung tercapainya sasaran pertama tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.7.
Program dan anggaran yang mendukung sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Program	Komoditi Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1.		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Padi Dan Populasi sapi	1.041.092.822	974.252.641	93,57%
2		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Produksi Padi dan Populasi Sapi	1.715.874.500	1.514.084.389	88,24%
3		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	Peningkatan Populasi Sapi	1.033.607.262	999.076.025	96,65 %
4		Program Penanggulangan Bencana Pertanian	Peningkatan Produksi Padi dan Populasi Sapi	89.991.800	85.210.950	94,68 %
5		Program : Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Produksi Padi dan Populasi Sapi	549.774.100	505.326.650	91,91 %

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran pertama dibandingkan dengan realisasi anggaran Program seperti yang dijabarkan diatas dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 3.8.
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan							
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%				
1	Meningkatnya produksi pertanian	1.1	Produksi Padi	%	41225	41.609,46	100,96%	1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.041.092.822	974.252.641			
		1.2	Populasi Sapi	%	5427	2951	54,37 %	2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.715.874.500	1.514.084.389			
								3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	1.033.607.262	999.076.025			
								4	Program Penanggulangan Bencana Pertanian	89.991.800	85.210.950			
								5	Program Penyuluhaan Pertanian	549.774.100	505.326.650			
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR 77,67 %							TOTAL PER SASARAN					4.430.340.484
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> -14,37 %														
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 84,38 %														

Dari Tabel diatas dapat kita lihat bahwa angka efisiensi yang diperoleh besar dari Nol (0) maka program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran 1 tersebut belum terlaksana dengan baik dan efisien dimana angka menunjukkan 14,37 %. Sedangkan Efektivitas menunjukkan angka 84,38 %, dimana kecil dari 100 % yang artinya seluruh program untuk mencapai peningkatan produksi pertanian tersebut belum terlaksana secara efektif. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan populasi sapi di Kota Payakumbuh akibat adanya Penyakit PMK yang menyerang 2 Tahun terakhir, sehingga menyebabkan banyaknya sapi masyarakat yang di jual oleh Peternak.

Sasaran 2
Meningkatnya produksi perikanan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.5.
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Produksi Perikanan

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Satuan	Tahun 2024		Kategori	Target Renstra Tahun 2024
				Target	Realisasi		
1	Jumlah Total Produksi Perikanan	571,09	Ton	560	565,40	100,07 %	560 %
	Capaian Rata-rata					100,07 %	

Pencapaian Total Produksi Perikanan Tahun 2024 sebesar 565,40 Ton, dimana menurun jika dibandingkan tahun 2023, sebesar 571.09 ton. Walaupun demikian hal ini sudah melebihi target sebesar 560 Ton atau mencapai 100,07 % dimana pencapaian kinerja dikategorikan sangat baik > 90 %, dengan predikat nilai capaian kinerja > 100 % atau melebihi target yang ditetapkan. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh faktor :

1. Ketersediaan benih ikan bermutu dan Induk Ikan bersertifikat.
2. Ketersediaan air yang memadai.
3. Penerapan teknologi sudah mulai optimal.
4. Adanya bantuan obat-obat ikan terutama untuk penanggulangan penyakit ikan.
5. Penggunaan Pakan yang bermutu
6. Adanya bantuan sarana prasarana perikanan berupa kolam terpal kepada kelompok tani.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Indikator Kinerja meningkatnya produksi perikanan, adalah :

1. Rehab sarana dan prasarana Balai Benih Ikan.
2. Sosialisasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
3. Tersedianya obat-obatan untuk kesehatan ikan.

Data penunjang capaian kinerja indikator jumlah total produksi perikanan yang diperoleh dari Kepala Bidang Perikanan. Sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.13.

Data Pendukung Produksi Total Produksi Perikanan

No	Komponen	Satuan	Keterangan
1	Pelaksanaan Pelatihan Pengolahan Hasil	1 kegiatan	Untuk Pelaku Usaha
2	Pemberian bantuan sarana dan prasarana perikanan kepada kelompok pembudidaya perikanan.	3 pokdakan	Untuk pokdakan
3	Penerapan teknologi anjuran	3 jenis	Terlaksananya teknologi anjuran
4	Kegiatan gerakan memasyarakatkan makan ikan	8 kegiatan	Terlaksananya kegiatan gemarikan
5	Pegadaan obat ikan	7 jenis	Tersedianya obat-obatan untuk kesehatan ikan
6	Pengujian kualitas air	10 lokasi	Terlaksananya Pengujian kwalitas air

Sumber :Dinas Pertanian Kota Payakumbuh

Dari hasil pencapaian produksi Komoditi Perikanan tersebut, maka dapat ditentukan persentase capaian Target Produksi Perikanan pada angka 100,07 %, Keberhasilan tersebut tentu saja didukung oleh pelaksanaan program kegiatan

dan juga anggaran yang ada pada Dinas Pertanian Tahun 2024. Adapun Program yang mendukung tercapainya sasaran kedua tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.7.
Program dan anggaran yang mendukung sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Program	Komoditi Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1.	Meningkatnya produksi Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Jumlah Total Produksi Perikanan	864.017.336	776.495.059	89,87 %
2.		Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Jumlah Total Produksi Perikanan	359,578,736	319,739,309	88,92 %

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran pertama dibandingkan dengan realisasi anggaran Program seperti yang dijabarkan diatas maka dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.8.
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%		
1	Meningkatnya produksi pertanian	1.1	Jumlah Total Produksi Perikanan	Ton	560	565,40	100,07 %	1	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	864.017.336	776.495.059	
								2	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	137.127.310	120.509.600	
								RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR				TOTAL PER SASARAN
							TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 10,07 %					
							TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 111,18 %					

Dari Tabel diatas dapat kita lihat bahwa angka efisiensi yang diperoleh besar dari Nol (0) maka program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran 2 tersebut terlaksana dengan baik dan efisien dimana angka menunjukkan 10,07%, sedangkan Efektivitas menunjukkan angka 111.18 %, dimana besar dari 100 % yang artinya seluruh program untuk mencapai peningkatan produksi pertanian tersebut terlaksana secara efektif.

Sasaran 3

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Walaupun Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja tidak termasuk dalam IKU Dinas Pertanian namun nilai AKIP tersebut masuk dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Kepala Dinas Pertanian. Pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.9.

Analisis Pencapaian Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Satuan	Tahun 2024		Kategori	Target Akhir Renstra Tahun 2025
				Target	Realisasi		
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	A	-	A	A	Sangat Baik	A
	Realisasi Kinerja					100 %	

Yang menjadi indikator kinerja dari sasaran 3 adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah oleh Inspektorat dimana pada tahun 2024 nilai AKIP Dinas Pertanian adalah A. Dimana pencapaian kinerja ini dikategorikan sangat baik dengan capaian > 90 %, dan jika dinilai capaian kinerja sesuai target dimana capaian sama dengan 100 %.

Untuk melihat pertanggungjawaban kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Payakumbuh sebagai salah satu perangkat daerah pelaksana urusan wajib pelayanan dasar sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan

yang berlaku maka dilakukan evaluasinya oleh Inspektorat Kota Payakumbuh. Penilaian ataupun evaluasi ini adalah digunakan juga sebagai landasan pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan ditahun berikutnya. Hasil evaluasi oleh inspektorat terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2024 adalah poin A dengan nilai 83,50.

Untuk mendukung pelaksanaan dari sasaran strategis ini, pada tahun 2024 adalah didukung oleh 1 (satu) program dan pada tabel berikut:

Untuk melihat pertanggungjawaban kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Payakumbuh sebagai salah satu perangkat daerah pelaksana urusan wajib pelayanan dasar sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dilakukan evaluasinya oleh Inspektorat Kota Payakumbuh. Penilaian ataupun evaluasi ini adalah digunakan juga sebagai landasan pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan ditahun berikutnya. Hasil evaluasi oleh inspektorat terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2024 adalah poin A dengan nilai 83,50 %.

Untuk mendukung pelaksanaan dari sasaran strategis ini, pada tahun 2024 adalah didukung oleh 1 (satu) program dan pada tabel berikut:

Tabel : 3.10

Program dan Kegiatan Penunjang Sasaran 2

1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12,837,534,505	11,489,490,636	89.50%
1).	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98,558,000	97,536,500	98.96%
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49,733,000	49,353,000	99.24%
2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48,825,000	48,183,500	98.69%
2)	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,696,032,493	9,699,332,728	90.68%
3	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,302,041,293	9,309,623,128	90.37%
4	Penyediaan Adm Pelaksanaan Tugas ASN	393,991,200	389,709,600	98.91%
3).	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	371,639,650	362,230,625	97.47%
5	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,001,500	2,994,000	99.75%
6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63,973,900	56,211,500	87.87%
7	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23,760,750	22,124,500	93.11%
8	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	6,083,500	6,080,625	99.95%
9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	274,820,000	274,820,000	100.00%
4).	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	501,975,314	440,967,637	87.85%
10	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	313,683,856	253,611,005	80.85%
11	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	188,291,458	187,356,632	99.50%
5).	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	932,723,048	889,423,146	95.36%
12	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	39,190,000	39,187,955	99.99%
13	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	597,400,000	555,224,466	92.94%
14	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19,080,000	18,795,000	98.51%
15	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	277,053,048	276,215,725	99.70%
6).	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	236,606,000	0	0.00%
16	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	236,606,000	230,444,000	97.40%

Untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi sasaran lima ini yaitu dengan membandingkan capaian realisasi keuangan pada program yang mendukung sasaran tersebut diatas dengan realisasi capaian kinerja. Dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.11.
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1.1 Nila AKIP Dinas Pertanian Oleh Inspektorat		A	A	100,00	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	12,837,534,505	11,489,490,636	89,50%
CAPAIAN DARI INDIKATOR						100,00	TOTAL PER SASARAN	12,837,534,505	11,489,490,636	89,50 %
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> : 10,5 %										
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> : 111,73 %										

Dari Tabel diatas dapat kita lihat bahwa angka efisiensi yang diperoleh besar dari Nol (0) maka program kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran 3 yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian, tersebut terlaksana dengan baik dan efisien dimana angka menunjukkan 10,5 %. Sedangkan Efektivitas menunjukkan angka 111,73 %, dimana besar dari 100 % yang artinya seluruh program untuk mencapai peningkatan produksi pertanian tersebut terlaksana secara efektif.

C. Akuntabilitas Keuangan

Selama Tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pertanian Kota Payakumbuh dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh. DPA Dinas Pertanian Kota Payakumbuh dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp.18.233.215.975,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.16.436.741.350,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 90,14 %, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2024 kondisi anggaran adalah Silpa Rp.1.796.474.639,- hal ini merupakan adanya sub kegiatan DAK yang gagal dalam proses tender.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Pertanian Kota Payakumbuh pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12.

Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2024

No.	Misi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Mewujudkan swasembada Pangan berkelanjutan	Rp.18.233.215.975,-	Rp.16.436.741.350	90,14 %,

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan

dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian Kota Payakumbuh pada Tahun 2024.

D. Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kota Payakumbuh dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Pertanian Kota Payakumbuh telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun 2024 dapat dilihat dari sebagai berikut :

1. Juara I lomba Kontes Ternak Tahun 2024 Tingkat Propinsi Sumatera Barat Kategori Sapi Pesisir Jantan.
2. Juara I lomba Kontes Ternak Tahun 2024 Tingkat Propinsi Sumatera Barat Kategori Sapi PO Betina.
3. Juara I lomba Kontes Ternak Tahun 2024 Tingkat Propinsi Sumatera Barat Kategori Simental Betina.
4. Juara I Kontes Ternak Tahun 2024 Tingkat Propinsi Sumatera Barat Kategori Kerbau Jantan.
5. Juara II lomba Kontes Ternak Tahun 2024 Tingkat Propinsi Sumatera Barat Kategori Sapi Limousin Jantan.
6. Juara II lomba Kontes Ternak Tahun 2024 Tingkat Propinsi Sumatera Barat Kategori Sapi Limousin Betina.
7. Juara II lomba Kontes Ternak Tahun 2024 Tingkat Propinsi Sumatera Barat Kategori Sapi Bali Jantan.
8. Juara II lomba Kontes Ternak Tahun 2024 Tingkat Propinsi Sumatera Barat Kategori Sapi PO Jantan.
9. Juara II Stand Pameran Pada Event Live Stock Expo 2024.
10. Juara III lomba Kontes Ternak Tahun 2024 Tingkat Propinsi Sumatera Barat Kategori Sapi Bali Betina.
11. Penghargaan Kandang Sapi Memenuhi Persyaratan Teknis
12. Juara Harapan I Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Propinsi Sumatera Barat.

FOTO PENGHARGAAN KONTES TERNAK





Juara II Lomba Stand Pameran Tk. Propinsi Sumbar

FOTO PENGHARGAAN FORIKAN KOTA PAYAKUMBUH



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2023. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pertanian Kota Payakumbuh dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2024 Dinas Pertanian Kota Payakumbuh menetapkan sebanyak (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja utama Dinas, dan 1 Sasaran pada SKP Kepala Dinas Pertanian sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 77,67 % atau interpretasi baik

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,07 % atau interpretasi sangat baik

Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00 % atau interpretasi sangat baik

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi mencapai target kecuali pencapaian populasi ternak sapi dimana tidak mencapai target karena adanya Kasus Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pertanian Kota Payakumbuh dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 18.233.215.975,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 16.436.741.350 atau dengan serapan dana APBD mencapai 90,14 %, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2024 Dinas Pertanian Kota Payakumbuh kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 1.796.474.639,-

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp.16.436.741.350, mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Pertanian Kota Payakumbuh. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Pertanian Kota Payakumbuh adalah 90,14 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Pertanian Kota Payakumbuh sudah optimal, namun untuk masa yang akan datang perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Payakumbuh.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kota Payakumbuh ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pertanian Kota Payakumbuh kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Payakumbuh. Semoga kegiatan kita ini diberkati oleh Allah SWT.

Payakumbuh, 2 Januari 2025

Kepala Dinas Pertanian

Kota Payakumbuh



Ir DEPI SASTRA

Nip 19650212 199303 1 011